

IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* MELALUI KARTU TANDA PENCARI KERJA ONLINE DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA

Wanti Yunia, Moh. Taufik Hidayat, RM. Haryo Bharoto

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Email haryo.bharoto@ugj.ac.id



DOI: 10.33603/reformasi.v4i2.10956

Diterima: Pebruari 2020; Direvisi: Maret 2020; Dipublikasikan: April 2020

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Implementasi E-Government Melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. ” Judul ini diangkat karena tahap E-Government yang sedang berlangsung masih berada dalam fase awal atau yang dikenal sebagai tahap persiapan. Terdapat banyak batasan yang dihadapi oleh pihak dinas, terutama terkait pelaksanaan kartu tanda pencari kerja secara online, karena masih menggunakan aplikasi yang tidak sepenuhnya mendukung. Aplikasi yang dipakai berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan, akses yang ada juga belum ditingkatkan secara optimal, dan dari segi dana untuk proyek E-Government masih kurang memadai, yang menyebabkan banyaknya kendala dalam penerapannya. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi literatur. Penelitian di lapangan dilaksanakan melalui wawancara dengan informan kunci dan informan tambahan. Studi literatur didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, jurnal ilmiah, karya akademis, dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan E-Government berlangsung melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online yang telah disediakan untuk publik. Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. Informan terdiri dari kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Masyarakat sebagai informan utama yang terlibat dalam pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja. Selain itu, terdapat informan pendukung yang terdiri dari beberapa kepala seksi di dinas tersebut dan bagian Operator AK/1. Berikut adalah hasil penelitian: 1). Terdapat kurangnya pemahaman dari pemimpin mengenai E-Government sehingga informasi yang diperoleh saat wawancara kurang memuaskan, terutama dalam hal pengembangan aplikasi. 2). Kurangnya pengembangan informasi yang tersedia untuk masyarakat menyebabkan ketidakjelasan bagi pemohon Kartu Tanda Pencari Kerja. 3). Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan E-Government masih minim. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan melanjutkan ke tahap berikutnya, pihak dinas perlu melakukan perbaikan terus-menerus, sehingga pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja Online dapat berkembang dan mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan secara efektif, hemat waktu, dan biaya.

Kata Kunci: *E-Government*, KTPK.

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu proses yang bersifat menyeluruh dan internasional, di mana setiap individu tidak mengenal dan tidak terikat oleh batas wilayah suatu negara. Ini berarti setiap orang dapat berkomunikasi dan bertukar informasi kapan saja dan di mana saja, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Globalisasi merupakan sebuah proses yang menciptakan sistem organisasi dan komunikasi di antara masyarakat di seluruh dunia, dengan tujuan untuk mengikuti sistem dan aturan yang serupa (Selo Soemardjan).

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memanfaatkan internet untuk menginformasikan dan memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat. Kemajuan teknologi telah diterapkan di berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, industri, kesehatan, serta dalam aspek pemerintahan lainnya, yang mendukung efisiensi dan efektivitas layanan publik. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan layanan berbasis elektronik (E-Government). Beberapa keuntungan dari E-Government mencakup pengurangan biaya administratif, peningkatan kemampuan untuk merespons berbagai permintaan dan pertanyaan mengenai layanan publik dari segi kecepatan dan akurasi, serta menyediakan akses layanan untuk semua aspek di semua tingkatan. Dengan kemajuan teknologi informasi, layanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih responsif dan optimal dengan memanfaatkan jaringan konektivitas modern. Oleh karena itu, layanan untuk para pencari kerja telah ditingkatkan melalui Kartu Tanda Pencari Kerja online yang dapat diakses secara langsung dan transparan, cepat, efisien, dan efektif. Kartu ini juga dikenal dengan istilah Kartu Kuning atau Kartu Tanda Pencari Kerja online, yang dikenal juga

sebagai kartu AK1. Kartu tersebut dibuat untuk mendata para pencari kerja. Dengan adanya inovasi dari pemerintah Kabupaten Majalengka, Kartu Kuning dapat diakses secara online.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016 mengenai Penempatan Tenaga Kerja, syarat untuk membuat Kartu Tanda Pencari Kerja meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau SIM, salinan ijazah yang telah dilegalisir, dua lembar pas foto ukuran 3x4, serta salinan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran.

Untuk mendaftar secara online, para pencari kerja harus membuka browser dan mengetik URL <https://ayokitakerja.kemnaker.go.id/>. Setelah itu, mereka perlu mengklik menu pendaftaran di pojok kanan atas, mengisi data yang diperlukan, lalu mengklik simpan. Setelah itu, informasi "selamat Anda sudah terdaftar" akan muncul, dan mereka dapat mengunjungi kantor dinas ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan legalisir dan Kartu Kuning mereka. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan E-Government adalah untuk memberikan layanan tanpa intervensi dari pegawai instansi publik dan menghindari antrean panjang untuk mendapatkan layanan yang sederhana.

Dari pengamatan penulis, pelaksanaan E-Government di dinas tersebut, yang terwujud dalam Kartu Tanda Pencari Kerja online, belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari penggunaan aplikasi yang berasal dari pusat kementerian ketenagakerjaan, keterbatasan jumlah pegawai, serta koneksi internet yang kurang mendukung, sehingga menghambat proses Kartu Tanda Pencari Kerja dalam konteks e-government.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, peneliti memiliki minat untuk mengangkat isu ini menjadi studi ilmiah dengan judul:

Pelaksanaan E-Government Melalui Kartu Pencari Kerja Online Pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

TINJAUAN PUSTAKA

E-Government merujuk pada pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam hal informasi keuangan pemerintah. E-Government bisa diterapkan dalam sektor legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk memperbaiki efisiensi internal serta memberikan layanan publik atau menjalankan proses pemerintahan yang lebih demokratis. Definisi menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54) menyatakan bahwa E-Government adalah usaha pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik. Sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2003, Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan tujuan mempercepat pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja sebagai syarat melamar pekerjaan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Melalui pengembangan E-Government, dilakukan penataan sistem manajemen dan prosedur kerja di lingkungan pemerintah dengan cara memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi terdiri dari dua aktivitas yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, serta sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. Penerapan kemajuan teknologi informasi agar layanan publik dapat

diakses dengan mudah dan biaya yang rendah di seluruh area negara.

Konsep E-Government muncul karena ada tiga faktor pendorong utama dari segi sejarah, yaitu:

1. Globalisasi yang melaju lebih cepat dari yang diperkirakan telah menimbulkan isu-isu penting seperti demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, masyarakat sipil, tata kelola perusahaan yang baik, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian setiap negara agar tidak terpinggirkan dari interaksi global. Dalam konteks ini, pemerintah harus menyesuaikan perannya dalam suatu negara, dari yang bersifat internal menjadi fokus pada cara untuk memposisikan masyarakat dan negaranya dalam komunitas global.
2. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) memungkinkan data, informasi, dan pengetahuan diciptakan dengan sangat cepat dan dapat tersebar ke seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik.
3. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di seluruh dunia tidak terlepas dari tantangan yang semakin besar bagi kinerja industri swasta dalam menjalankan aktivitas ekonominya (sebagai konsumen) dengan pelaku ekonomi lain (pedagang, investor, perusahaan, dan sebagainya) yang telah menciptakan standar pelayanan yang semakin menarik seiring waktu (Indrajit, 2004).

Menurut Moon (2002), penerapan E-government menghadapi empat tantangan utama, yaitu:

1. Kekurangan keterampilan, termasuk dalam teknologi dan pemasaran.
2. Keterbatasan sumber daya finansial, termasuk biaya yang terkait dengan penyediaan layanan ganda (off-line dan on-line).

3. Minimnya dukungan politik, termasuk ketidakjelasan komitmen politik pada masa pemilihan.
4. Variasi budaya, termasuk pengawasan dari atasan yang diperlukan dalam organisasi publik untuk operasional E-Government.

Sementara itu, Richardus Eko Indrajit (2005:18) menyebutkan setidaknya ada enam komponen akurat yang harus diperhatikan dalam penerapan E-Government, yaitu:

1. Pengembangan Konten. Berhubungan dengan pembuatan aplikasi (software), pemilihan standar teknis, bahasa pemrograman yang digunakan, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan antarmuka pengguna, dan lainnya.
2. Pembangunan Kompetensi. Berfokus pada rekrutmen SDM, pelatihan, dan pengembangan keahlian semua pegawai di berbagai tingkat pemerintahan.
3. Konektivitas. Berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di tempat pelaksanaan E-Government.
4. Hukum Siber. Mengacu pada adanya kerangka dan sistem hukum yang berlaku terkait aktivitas E-Government.
5. Antarmuka Warga. Berfokus pada pengadaan SDM dan pengembangan berbagai saluran akses (multi access channels) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan E-Government kapan saja dan di mana saja.
6. Modal. Berhubungan dengan model pembiayaan proyek E-Government, terutama berkaitan dengan biaya setelah penyelesaian proyek, seperti untuk perawatan dan pengembangan, di mana tim harus mempertimbangkan model pemasukan yang mungkin dapat diterapkan oleh pemerintah.

Dengan munculnya era demokrasi digital melalui pemanfaatan teknologi internet, partisipasi dalam berbagai bentuk beralih ke platform digital. Partisipasi daring melanjutkan dinamika yang ada sebelumnya. Dulu, radio dan televisi menjadi media untuk berpartisipasi. Saat ini, internet telah menjadi sarana utama untuk partisipasi yang efektif. Selain itu, kehadiran teknologi digital seperti Kartu Tanda Pencari Kerja Online dapat mendorong peningkatan partisipasi sebagai inti dari demokrasi.

Menurut Budi Rianto dan rekan-rekan (2012:39), setidaknya ada empat indikator kesuksesan E-Government, yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi di pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi untuk kepentingan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi E-Government yang mendukung tugas kantor dan layanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui email, SMS, atau telekonferensi.

Melalui pengembangan E-Government, sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan diatur dengan cara:

1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menghapus batas-batas organisasi dan birokrasi.
2. Membangun jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah berkolaborasi secara terintegrasi, guna mempermudah akses ke semua informasi layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Government dan Latar Belakang

Era globalisasi dan kemajuan teknologi berpengaruh pada berbagai aktivitas dalam masyarakat, termasuk organisasi politik, swasta, dan sektor

pemerintahan. Pengaruh teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam lembaga-lembaga pemerintah. Dengan adanya kemajuan dalam teknologi, informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet, sehingga setiap orang dapat mencari data tanpa perlu datang langsung ke instansi pemerintah atau swasta kapan saja dan tanpa batasan waktu. Selain itu, pemerintah dapat menyebarkan informasi atau berita penting kepada masyarakat tanpa perlu melakukan pengumuman langsung seperti yang dilakukan pada masa sebelum ada teknologi digital. Inovasi teknologi menunjang pemerintah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikenal sebagai E-Government, di mana pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan efisien. E-Government berfungsi untuk memanfaatkan informasi dan teknologi komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyampaian layanan publik yang lebih baik. E-Government telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya menyediakan layanan publik yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Diskusi mengenai E-Government dalam konteks reformasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh konsep New Public Management (NPM). NPM memandang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kebijakan, serta nilai-nilai demokrasi.

Perhatian terhadap E-Government di Indonesia dimulai pada tahun 2001 setelah pengeluan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 mengenai Telematika yang mengisyaratkan bahwa pegawai pemerintah diharuskan memanfaatkan teknologi telematika untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, inisiatif dari

pemerintah pusat ini tidak mendapatkan dukungan serta respons yang memadai dari semua pihak terkait, sehingga penggunaan teknologi informasi belum optimal. Dalam konteks pengembangan E-Government, merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi pengembangan E-Government, pemerintah telah merumuskan beberapa strategi utama sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan yang handal, dapat dipercaya, dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Mengatur sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan daerah secara menyeluruh.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.
4. Meningkatkan peran serta sektor swasta serta mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan sumber daya manusia dalam pemerintahan dan meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan dengan pendekatan yang sistematis melalui langkah-langkah yang realistis dan terukur.

Berikut adalah langkah-langkah dalam pengembangan E-Government: Menurut Center For Democracy and Technology dan infoDev, dalam Buku Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi, dan e-governance, proses implementasi E-Government terbagi menjadi beberapa tahap. Tiga tahapan tersebut adalah:

1. Publish. Tahapan ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk memperluas akses ke informasi pemerintah, contohnya dengan membuat situs informasi di setiap lembaga, menyiapkan sumber daya manusia, mensosialisasikan situs, serta menyediakan akses yang mudah untuk baik kalangan internal maupun publik.

2. Interact. Ini merupakan tahap untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, contohnya dengan menciptakan situs yang bersifat interaktif dan mengadakan pertemuan yang terhubung dengan lembaga-lain. Contoh aplikasi yang dapat digunakan termasuk: portal situs, e-mail, mailing list, internet relay chatting, tele-konferensi, web-TV, dan sebagainya.
3. Transaksi. Ini adalah tahap di mana layanan pemerintah disediakan, dan pada fase transaksi juga terdapat komunikasi dua arah seperti di tahap interaktivitas. Namun, di sini pengguna bisa mencari dan membeli barang, membayar untuk layanan, serta mengumpulkan informasi yang akan diproses.

Dengan kata lain, e-government dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka memajukan demokrasi. Ini merupakan cara untuk meningkatkan pelayanan dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah, dengan fokus pada perbaikan kinerja di semua lapisan pemerintahan. Seperti yang diungkapkan dalam kajian mengenai e-government di Gedung Putih yang dikutip oleh Taicher Hughes dan Dow (2002) dalam karya Marc Hoizer (2004:25) bahwa: E-Government tidak hanya akan mengubah cara penyampaian pelayanan publik, tetapi juga hubungan fundamental antara pemerintah dan rakyat.

Pengertian dan Latar Belakang E-Government

E-Government berhubungan dengan penerapan teknologi informasi, seperti jaringan area luas, internet, dan komunikasi seluler oleh lembaga pemerintah, yang memiliki potensi untuk merubah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu definisi E-Government yang banyak dirujuk di tingkat internasional berasal dari publikasi Bank

Dunia, yang mendeskripsikan E-Government sebagai berikut: E-Government mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi (seperti jaringan area luas, internet, dan komputasi mobile) oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya.

Definisi yang cukup umum ini pada dasarnya merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi oleh badan pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan tata pemerintahan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat yang lebih efisien, efektif, serta produktif. Selain itu, E-Government juga merupakan penerapan teknologi informasi oleh pemerintahan daerah, pusat, dan federal untuk mendukung operasional pemerintah, partisipasi masyarakat serta penyediaan layanan publik. Interaksi dalam konteks ini meliputi pengajuan permohonan, pembayaran, dan informasi lain melalui internet. Selanjutnya, menurut The World Bank Group, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa E-Government adalah inovasi dalam pemerintahan yang dapat membantu pelaksanaan aktivitas pemerintah serta mempermudah tugas yang dikerjakan. E-Government dapat berfungsi sebagai alat pendukung bagi pemerintah untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien, karena dengan dukungan internet, semua proses dan prosedur menjadi lebih sederhana.

Menurut Richardus Eko Indrajit (2005:18), setidaknya ada enam elemen penting yang harus diperhatikan dalam penerapan E-Government, yaitu:

1. Pengembangan Konten. Ini mencakup pengembangan aplikasi, pemilihan standar teknis, pemakaian bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan antarmuka pengguna, dan lain-lain.
2. Pembangunan Kompetensi. Ini berkaitan dengan penyediaan sumber

daya manusia, pelatihan, serta pengembangan kompetensi dan keterampilan seluruh personel di berbagai lini pemerintahan.

3. Konektivitas. Ini mencakup ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di tempat di mana E-Government diterapkan.
4. Hukum Siber. Ini menyangkut adanya kerangka hukum dan regulasi yang berlaku terkait dengan aspek-aspek kegiatan E-Government.
5. Antarmuka Warga. Ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia dan pengembangan berbagai saluran akses yang bisa digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan E-Government kapan saja dan di mana saja.
6. Modal. Ini menyangkut pola pembiayaan proyek E-Government, terutama terkait dengan biaya setelah proyek selesai dilaksanakan, misalnya untuk pemeliharaan dan pengembangan, di mana tim perlu mempertimbangkan jenis-jenis model pendapatan yang mungkin diterapkan dalam pemerintahan.

Secara umum, terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan konsep E-Government di negara masing-masing (Indrajit 2004), yaitu:

1. Permasalahan yang terkait dengan cara menciptakan dan menentukan saluran akses digital (atau elektronik) yang dapat digunakan secara efisien oleh masyarakat dan pemerintah.
2. Permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi lembaga-lembaga di luar pemerintah (entitas komersial serta organisasi non-komersial lainnya) dalam membangun infrastruktur dan superstruktur e-government yang diperlukan, dan
3. Permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis institusi,

terutama yang berhubungan dengan isu biaya investasi dan operasional, agar program manajemen perubahan e-government ini dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

Di sisi lain, menurut Indrajit (2006:27), terdapat 4 jenis hubungan E-Government, yaitu:

1. Government to Citizen (G2C). Di mana pemerintah mengembangkan dan menerapkan berbagai penggunaan teknologi informasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan interaksi dengan warga. G2C bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran akses, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menghubungi pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan layanan sehari-hari.
2. Government to Business (G2B). Salah satu peran utama pemerintah adalah menciptakan iklim bisnis yang mendukung agar perekonomian suatu negara dapat berjalan dengan baik. Contohnya adalah proses tender untuk proyek-proyek pemerintah yang melibatkan sektor swasta. G2B adalah bentuk hubungan antara pemerintah dan pengusaha, dengan tujuan untuk mempermudah praktisi bisnis dalam menjalankan usaha mereka.

Pemerintah ke Pemerintah (G2G). Kebutuhan untuk saling berkomunikasi antara satu pemerintah dengan yang lain setiap harinya tidak hanya terbatas pada hal-hal diplomatik, tetapi juga untuk memudahkan kolaborasi. G2G adalah interaksi antara pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam aspek-aspek administrasi perdagangan, proses politik, dan mekanisme hubungan sosial serta budaya.

Pemerintah ke Karyawan (G2E). Pada akhirnya, penerapan e-government juga ditujukan untuk meningkatkan performa dan kesejahteraan pegawai pemerintah yang melayani masyarakat di

berbagai lembaga. G2E bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri serta karyawan pemerintah yang berada di berbagai institusi publik.

Dari keempat jenis hubungan yang ada, tampak bahwa E-Government berfungsi sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Keberadaan sistem ini tidak hanya memberikan dukungan bagi kinerja pemerintah tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan di suatu negara. Tentu saja, adopsi teknologi ini harus dioptimalkan dan dikembangkan agar Indonesia bisa maju dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan karakteristik transaksi informasi dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah lewat jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilakukan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Tingkat 1 – Persiapan yang mencakup: Penyusunan siklus informasi di setiap lembaga; Persiapan sumber daya manusia; Penyediaan akses yang mudah, seperti pusat komunitas multifungsi, warnet, SME-Center, dan lain-lain.
2. Tingkat 2 – Pematangan yang mencakup: Pembuatan situs informasi publik yang interaktif; Pembangunan antarmuka untuk koneksi dengan institusi lain.
3. Tingkat 3 – Pemantapan yang mencakup: Pengembangan situs untuk transaksi pelayanan publik; Penyediaan interoperabilitas antara aplikasi dan data dengan lembaga lain.
4. Tingkat 4 – Pemanfaatan yang mencakup: Pengembangan aplikasi untuk layanan yang berupa G2C, G2G, G2B, dan G2E yang terintegrasi.

Selain itu, terdapat elemen lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengembangan e-government, seperti yang diungkapkan dalam buku sistem informasi

manajemen oleh Dr. Ir. Eko Nugroho dan dinyatakan oleh Moon (2008:168), yaitu:

1. Kemauan. Diartikan sebagai keinginan atau komitmen untuk melakukan suatu hal. Persepsi masyarakat terhadap ICT berpengaruh pada kemauan mereka untuk memanfaatkan fasilitas ICT (Stevanus Wisnu W, 2006:4).
2. Budaya Lokal. Merupakan budaya daerah yang memengaruhi penerapan e-government terkait kemampuan masyarakat dalam mengadopsi transaksi elektronik. Kesiapan masyarakat sebagai pengguna juga berhubungan dengan seberapa baik mereka bisa menggunakan layanan dalam penerapan e-government tersebut; peran masyarakat sangat menentukan kesuksesan implementasi e-government. (Eko Nugroho, 2008:168).

Tujuan dan Manfaat E-Government

Tujuan E-Government meliputi sebagai berikut:

1. Memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dan berinteraksi dengan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Mendorong kerjasama yang interaktif antara lembaga pemerintah dan swasta untuk memperkuat perekonomian sosial.
5. Menciptakan sistem manajemen dan kerja yang berjalan dengan lancar, transparan, dan efisien antar lembaga pemerintah.

Adapun manfaat dari E-government itu sendiri adalah:

1. Menyediakan informasi dan layanan tanpa batasan waktu dan lokasi, masyarakat memiliki kebebasan untuk mengakses informasi serta layanan yang mereka butuhkan kapan saja dan

- di mana saja. Layanan dan informasi tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan pencari informasi tidak perlu datang secara langsung ke kantor pemerintah untuk mendapatkan yang mereka perlukan.
2. Memperluas akses terhadap layanan dan informasi, dengan memanfaatkan internet sebagai salah satu cara untuk menyampaikan layanan dan informasi, investor dari Amerika dan Eropa dapat mendapatkan informasi tentang potensi sumber daya alam di Provinsi Lampung hanya dengan mengunjungi situs resmi provinsi tersebut.
 3. Meningkatkan kualitas layanan berkat kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, layanan yang disajikan dalam bentuk elektronik serta multimedia.
 4. (Bentuk Elektronik) bisa lebih menarik dan berkualitas daripada layanan dan informasi yang disajikan dalam bentuk kertas.
 5. (Bentuk Kertas) saja. Mengurangi biaya administratif dan waktu yang dikeluarkan masyarakat, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi serta layanan dengan lebih mudah tanpa harus melewati berbagai prosedur birokrasi dan mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkannya.
 6. Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan konsep Good Corporate Governance. Transparansi, akuntabilitas, dan kontrol yang baik dapat menghilangkan rasa curiga dan ketidakpuasan dari semua pihak.
 7. Menyediakan sarana pembelajaran bagi masyarakat, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih metode atau cara yang paling sesuai dan nyaman untuk mengakses layanan dan informasi dari pemerintah.

8. Membangun koordinasi pemerintahan yang optimal dan efisien, misalnya koordinasi antara staf di suatu dinas pemerintahan yang letaknya terpisah dapat dilakukan melalui email, internet Relay Chat (IRC), atau bahkan konferensi video secara online dan langsung.
9. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik, dengan E-Government, media umpan balik (Feedback) dapat dibentuk agar masyarakat dan pihak berkepentingan bisa menyampaikan pendapat dan pandangan, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis.

Penerapan E-Government di Majalengka

Penerapan E-Government di Majalengka belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan internet. Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sistem online sudah diterapkan melalui kartu tanda pencari kerja, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih tidak efektif, meski telah dilakukan melalui media sosial dan kegiatan sosialisasi. Selain itu, penerapan E-Government juga tidak didukung oleh anggaran yang memadai, sehingga menghambat proses implementasinya.

Definisi Kartu Tanda Pencari Kerja

Kartu Tanda Pencari Kerja, yang juga dikenal sebagai Kartu AK1 atau Kartu Kuning, memuat informasi pribadi pemiliknya dan bertujuan untuk mendata pencari kerja. Dengan adanya inovasi dari pemerintah Kabupaten Majalengka, Kartu AK1 atau Kartu Tanda Pencari Kerja sudah dapat diakses secara online. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, syarat untuk membuat kartu ini

termasuk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau SIM, Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, Pas Foto berukuran 3x4 sebanyak dua lembar, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Untuk mendaftar secara online, pencari kerja perlu mengunjungi laman browser dan memasukkan URL <https://ayokitakerja.kemnaker.go.id>. Setelah itu, klik 'daftar' di sudut kanan atas, isi data yang diperlukan, tekan simpan, dan akan muncul notifikasi "selamat Anda sudah terdaftar". Selanjutnya, mereka dapat langsung mengunjungi kantor dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk legalisasi dan mendapatkan kartu kuning.

Persyaratan untuk Membuat Kartu Tanda Pencari Kerja Secara Online

Untuk membuat kartu tanda pencari kerja secara online, bisa diakses melalui situs resmi Dinas Ketenagakerjaan <http://infokerja.naker.go.id> atau dengan memasukkan URL <https://ayokitakerja.kemnaker.go.id>. Kartu ini dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan swasta, serta memiliki kelengkapan sebagai kartu tanda pencari kerja online. Berikut ini adalah langkah-langkah dan persyaratan pembuatannya:

1. Kunjungi situs resmi Dinas Ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan di <http://infokerja.naker.go.id>.
2. Pilih menu pendaftaran.
3. Isi identitas diri, seperti status pendaftaran, user ID, email, nomor telepon, dan password.
4. Kemudian, isi detail informasi yang diminta, termasuk akun, data pribadi, pekerjaan, keterampilan, dan pendidikan.
5. Setelah password dibuat, pastikan untuk mengunggah foto resmi berukuran 3x4.
6. Ikuti instruksi yang terdapat di laman dan lengkapi semua data yang diminta, lalu klik tombol simpan.

7. Data akan otomatis terkirim ke Dinas Ketenagakerjaan. Setelah semua tahapan selesai, kunjungi kantor dinas ketenagakerjaan di area pendaftaran untuk mengambil Kartu Tanda Pencari Kerja yang sudah dilegalisir.

Peran Kartu Tanda Pencari Kerja

1. Kartu Tanda Pencari Kerja Online berfungsi untuk membantu Dinas Ketenagakerjaan dalam mendata jumlah pencari kerja di wilayah tersebut, serta dapat digunakan untuk melamar kerja di instansi pemerintah atau mengikuti seleksi calon pegawai negeri.
2. juga berfungsi untuk melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan jika pencari kerja belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, jika telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan sebagai pencari kerja, mereka akan dimasukkan ke dalam Database yang akan dikelompokkan berdasarkan pendidikan dan keterampilan. Perusahaan yang mencari tenaga kerja melalui Dinas Ketenagakerjaan akan menerima informasi pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
3. Selain itu, ada Kartu Tanda Pencari Kerja. Jika seseorang ingin mencari pekerjaan, mereka perlu membuat Kartu Tanda Pencari Kerja dengan mencantumkan data yang telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Ketika ada informasi mengenai lowongan pekerjaan, pihak Dinas Ketenagakerjaan akan menghubungi mereka dan akan membantu mendapatkan pekerjaan dari sumber yang tepercaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan

manfaat tertentu. Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penyajian data dilakukan melalui pemaparan dan gambaran-gambaran, karena tujuan peneliti adalah untuk mendeskripsikan situasi atau peristiwa, dengan teknik wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen.

Metode yang diterapkan dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan naturalistik. Penelitian dengan pendekatan naturalistik dilakukan di lingkungan yang alami, yaitu dalam konteks sosial yang sedang berlangsung. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti dan kemudian menganalisisnya secara mendalam. Menurut Sugiyono dalam Harnani pasolong (2013: 161), “metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk studi objek dalam keadaan alami, berbeda dengan eksperimen. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi.” Peneliti memilih metode kualitatif karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang saling mempengaruhi, melainkan untuk menggali, menemukan, menjelaskan dan mempresentasikan tentang “ Implementasi E-Government Melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.”

Informan dan Teknik pemilihan Informan

Informan adalah individu yang memberikan informasi, penjelasan, atau data yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sampel atau informan yang terlibat adalah mereka yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.

Teknik pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling, yang berarti pemilihan informan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2017: 85). Informan Kunci:

1. Staf di bidang pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja Online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
2. Informan Pendukung: Masyarakat yang telah memanfaatkan E-Government melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam sebuah penelitian karena fokus utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2017:225): "Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di pengaturan alami, sumber data utama, serta teknik pengumpulan data yang lebih mengutamakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. "
2. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
3. Studi Pustaka. Ini adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti buku dan peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penerapan E-Government untuk menyediakan dasar dalam menyelesaikan masalah.
4. Studi Lapangan. Ini merupakan metode pengumpulan data melalui penelitian langsung di lokasi yang diteliti dengan teknik sebagai berikut:
5. Observasi. Ini adalah teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan pengamatan langsung di objek penelitian, tetapi tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut.
6. Wawancara. Ini merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan

tanya jawab dengan informan kunci serta informan pendukung. Wawancara dalam penelitian ini bersifat semi-terstruktur, di mana penulis menggali informasi secara mendalam tentang Implementasi E-Government Melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka, dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara verbal dalam suasana yang bebas tetapi terarah. Secara teknis, penelitian ini mengikuti pertanyaan penelitian atau panduan wawancara yang telah dipersiapkan, dengan tujuan untuk menemukan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah yang ada dengan meminta pendapat dari pihak yang diwawancarai.

7. Dokumentasi. Ini melibatkan pencarian informasi dalam bentuk dokumen yang mendukung analisis dan interpretasi data, termasuk foto, video, dan rekaman.

Teknik uji keabsahan data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian sering kali berkaitan dengan validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauh mana kesesuaian antara data yang diperoleh pada objek penelitian dengan informasi yang dilaporkan oleh peneliti. Oleh karena itu, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara laporan peneliti dan data yang sebenarnya di lapangan. Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dan stabilitas dari data atau temuan yang ada. (Sugiyono, 2017: 267) Menurut Sugiyono (2017: 270), pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup: uji kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), dependabilitas (reliabilitas), dan konfirmabilitas (objektivitas). Penulis melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik Triangulasi. Wiersma

(Sugiyono, 2017: 273) menyatakan: "Triangulasi adalah validasi silang kualitatif. Ini mengevaluasi kesahihan data berdasarkan konvergensi dari berbagai sumber data atau prosedur pengumpulan data yang berbeda." Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi dimaksudkan sebagai cara mengecek data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda serta dalam waktu yang berbeda. Dengan demikian, ada triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk mengatasi perbedaan konstruksi kenyataan dalam konteks studi saat mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari sudut pandang yang berbeda.

Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam triangulasi ini:

1. Membandingkan data hasil observasi di lapangan dengan hasil wawancara dari para informan.
2. Membandingkan hal-hal yang diungkapkan oleh orang di depan publik dengan apa yang mereka sampaikan secara pribadi.
3. Mengaitkan hasil wawancara dengan konten dokumen yang relevan.
4. Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah tepat dan handal, maka dilakukan validitas data dengan metode triangulasi.

Metode ini melibatkan pengajuan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda terkait data atau hasil wawancara. Triangulasi data bertujuan untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dan mencegah adanya bias dalam penelitian, dengan menggali informasi dari sumber lain yang relevan dengan Implementasi E-Government Melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yang berfungsi untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya saat penelitian berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan serta dilengkapi dengan keterangan tambahan dan data pendukung. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana Implementasi E-Government melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017: 246-252) menyatakan bahwa: "Proses analisis data kualitatif berjalan secara interaktif dan berkesinambungan hingga selesai, sehingga data yang ada menjadi beragam. "

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

1. Pengurangan Data (Data Reductor). Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, sehingga perlu dicatat dengan hati-hati dan detail. Seperti yang telah dijelaskan, semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data akan semakin meningkat, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, analisis data perlu segera dilakukan melalui reduksi data. Pengurangan data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, serta memfokuskan pada elemen-elemen yang krusial untuk mencari tema dan pola. Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut serta mencarinya jika diperlukan. Pengurangan data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti komputer mini untuk memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Penyajian Data (Data Display). Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data.

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk narasi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan format serupa. Dengan menyajikan data, akan lebih mudah untuk memahami situasi yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Selanjutnya, disarankan bahwa dalam menyajikan data, selain menggunakan teks naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, jaringan (network), dan diagram.

3. Penarikan Kesimpulan/Pemeriksaan (Conclusion drawing/verification). Tahap ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang diusulkan bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ada bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut akan diperkuat. yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *credible*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Government Melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

Perkembangan teknologi informasi telah berkembang dengan sangat cepat sehingga kini banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan segera dan mudah, yang pada gilirannya membantu menghemat waktu dan biaya. Terutama dalam transformasi layanan yang terus-menerus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu menuju arah yang lebih modern,

sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah mencakup pembaruan sistem layanan secara daring agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, yang sering disebut sebagai Pemerintahan Elektronik, atau E-Government, merupakan implementasi dari perubahan struktur pemerintahan di era digital saat ini. Pemerintahan Elektronik sudah menjadi hal yang biasa bagi pemerintah yang telah mengadopsi E-Government. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 mengenai Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), disebutkan bahwa aparatur pemerintah harus memanfaatkan teknologi telematika untuk mendukung tata kelola yang baik dan mempercepat proses demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, inisiatif dari pemerintah pusat ini tidak mendapatkan dukungan serta tanggapan dari semua pemangku kepentingan, sehingga penggunaan teknologi informasi belum mampu dimaksimalkan. Di Indonesia, pengembangan E-Government sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang strategi pengembangan E-Government, terdapat beberapa strategi utama yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan yang dapat diandalkan dan dipercaya, serta mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
2. Mengorganisir sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan daerah secara menyeluruh.
3. Menggunakan teknologi informasi secara efektif.
4. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dan pengembangan industri telekomunikasi serta teknologi informasi.
5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan dan peningkatan literasi elektronik masyarakat.

6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui langkah-langkah yang realistis dan terukur.

Selanjutnya, Langkah-Langkah Pengembangan E-Government adalah sebagai berikut: Dengan demikian, E-Government dapat berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki interaksi antara pemerintah dan warganya dalam rangka meningkatkan demokrasi, karena hal ini adalah cara untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan terhadap pemerintah dengan penekanan pada peningkatan kinerja di semua level pemerintahan. Seperti yang diungkapkan dalam konteks E-Government di Gedung Putih yang dikutip oleh: (Taicher Hughes dan Dow 2002) dalam Marc Hoizer (2004:25) bahwa: E-Government akan merubah tidak hanya cara di mana sebagian besar layanan publik disajikan, tapi juga hubungan dasar antara pemerintah dan warga negara. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, pada Bab V mengenai mekanisme layanan penempatan tenaga kerja, Pasal 38 menyatakan bahwa pencari kerja: Pencari kerja yang ingin bekerja baik di dalam maupun luar negeri wajib mendaftar di dinas kabupaten/kota atau kecamatan sesuai dengan tempat tinggal untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/1).

Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/1) seperti yang disebutkan pada ayat (1), pencari kerja dapat mengajukan pendaftaran secara manual atau melalui sistem daring dengan melampirkan:

1. Salinan KTP yang masih berlaku
2. Foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
3. Salinan ijazah pendidikan terakhir
4. Salinan sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki dan/atau
5. Salinan surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memilikinya.

Berdasarkan isu yang diteliti oleh penulis yang merujuk pada peraturan Inpres serta menteri ketenagakerjaan RI, penulis melakukan wawancara yang tidak terstruktur (pra-penelitian) dengan mendatangi dinas terkait dan melakukan wawancara dengan beberapa sumber informasi, termasuk kepala seksi pelatihan, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Wahyu Sudianto, S. IP, selaku kepala seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, yang penulis rangkum: "Pelayanan pendaftaran kartu tanda pencari kerja sudah tersedia secara online sejak sekitar satu tahun lalu, dan tahun ini juga sudah dalam format online. Namun, karena pandemi Covid-19, pelayanan yang berhubungan langsung dengan kementerian ketenagakerjaan RI terpaksa ditutup sementara dan saat ini website dinas sedang mengalami masalah. Namun, untuk tahun depan, kami berencana untuk membuat aplikasi pencari kerja sendiri agar masyarakat dari lokasi jauh tidak perlu kembali bolak-balik ke dinas. " Dari pernyataan informan di atas, penulis berkesimpulan bahwa E-Government atau sistem berbasis elektronik telah diterapkan di dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah melalui pemberian layanan pendaftaran kartu tanda pencari kerja secara online. Sistem online tersebut dapat diakses melalui browser dengan mengetikkan URL <https://ayokitakerja.kemnaker.go.id/>. Pendaftaran kartu pencari kerja secara online merupakan penerapan dari pemerintahan elektronik yang telah dikembangkan dan dikelola oleh dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Peningkatan pelayanan secara online ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas proses pembuatan kartu pencari kerja, dengan sasaran utama masyarakat. Dengan adanya layanan pemerintah berbasis elektronik ini, pembuatan kartu pencari kerja menjadi

lebih efektif dan efisien, serta menghemat waktu dan biaya.

Pengembangan Aplikasi

Pengembangan Aplikasi adalah proses pembuatan perangkat lunak yang dimulai dari ide awal hingga aplikasi selesai dan siap digunakan. Dalam pelaksanaan E-Government, dibutuhkan perubahan dalam prosedur pengembangan Aplikasi agar pengolahan data di tempat kerja dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan tentang pengembangan aplikasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja melalui wawancara dengan Bapak Wahyu Sudianto, S. IP. , yaitu:

"Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini terdapat dua aplikasi yang telah online:

1. Melalui Ayokitakerja Kemnaker RI
2. Melalui Website layanan ketenagakerjaan

Untuk pengembangan aplikasinya, Dinas Ketenagakerjaan memerlukan data spesifik, namun saat ini mereka belum dapat otomatis mengembangkan sistemnya. Sejak tahun 2017, ada beberapa kendala yang menyebabkan aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan mengalami gangguan, dan website layanan juga mengalami masalah. Oleh karena itu, di awal atau akhir tahun akan dilakukan pembaruan sistem yang lebih baik agar lebih efektif, efisien, serta menghemat waktu dan biaya. "

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengembangan Aplikasi merupakan pengembangan perangkat lunak atau pengolahan data melalui serangkaian proses dari pembuatan konsep hingga aplikasi siap digunakan oleh pemerintah, sehingga pelayanan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pengembangan Aplikasi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh masih digunakannya aplikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga pelayanan menjadi terganggu, tidak efektif, dan efisien, serta menyulitkan masyarakat yang harus menunggu saat membuat kartu pencari kerja. Selain itu, website Dinas Ketenagakerjaan juga mengalami kerusakan, yang membuat pelayanan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu mengembangkan sistem atau aplikasi baru yang lebih baik agar pelayanan dapat maksimal, dengan melakukan penelitian ke dinas lain sebagai bahan untuk pengembangan Aplikasi.

Keadaan Perangkat Aplikasi yang Mendukung

Untuk mencapai keberhasilan E-Government, pemerintah perlu memiliki aplikasi yang menunjang pelaksanaan E-Government agar tidak menjadi tidak efektif dan berbelit-belit, seperti saat pengurusan kartu pencari kerja yang memerlukan antrean. Apabila situs web dinas ketenagakerjaan mengalami kerusakan atau kesalahan, maka pelayanan menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu mengembangkan sistem atau aplikasi baru yang lebih baik agar pelayanan dapat berjalan dengan efisien. Dengan melakukan riset dari dinas lain, pengembangan pemerintahan harus melibatkan aplikasi yang mendukung implementasi E-Government. Berikut adalah kondisi perangkat aplikasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja melalui wawancara dengan Bapak Wahyu Sudianto, S. IP. Dia menyebutkan bahwa Dinas tersebut telah memiliki situs sendiri untuk layanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja secara daring, meski tetap menggunakan aplikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun,

jika terjadi masalah dengan Operator AK/1 atau pegawai yang menangani pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja Online, mereka dapat beralih menggunakan situs pelayanan Dinas Ketenagakerjaan. “Keadaan perangkat seperti komputer dan internet/wifi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah cukup mendukung, walaupun sistem aplikasi masih kurang optimal karena kami masih bergantung pada aplikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, aplikasi khusus dinas sudah ada, hanya saja sering mengalami kesalahan. Oleh karena itu, insya Allah kami berencana untuk menciptakan sistem aplikasi yang lebih baik tahun depan.” Penelitian menunjukkan bahwa perangkat aplikasi yang mendukung di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak berjalan dengan optimal. Meskipun perangkatnya sudah memadai, tanpa dukungan aplikasi yang baik, pelaksanaan E-Government tidak dapat berjalan dengan lancar.

Ketersediaan web sangat penting

Implementasi E-Government memerlukan adanya web untuk mendukung pelaksanaannya. Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, keberadaan web yang tersedia sudah memadai karena mereka telah memiliki situs khusus untuk layanan Dinas Ketenagakerjaan. Berikut adalah keberadaan web yang diungkapkan oleh Operator AK/1 atau Kartu Tanda Pencari Kerja Online melalui wawancara dengan Bapak Bachtiar Lubis. Dia menjelaskan, “Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kami sudah mempunyai web yang tersedia untuk pelayanan, khususnya untuk Pelayanan Kartu AK/1 atau Kartu Tanda Pencari Kerja Online yang dapat diakses di Website: <https://dk2ukm.majalengkakab.go.id>.” Menurut penelitian yang dilakukan, keberadaan web di Dinas Ketenagakerjaan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah optimal.

Ketersediaan informasi dan berita untuk masyarakat dalam penerapan E-Government. Informasi dan berita adalah aspek penting yang harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka tahu berbagai aktivitas pemerintah, terutama dalam penerapan E-Government. Dalam pelaksanaan E-Government, ketersediaan informasi dan berita untuk masyarakat sangatlah penting agar prosesnya berjalan dengan baik, karena kesuksesan E-Government sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memegang peranan signifikan dalam penerapan E-Government. Berikut adalah ketersediaan informasi dan berita bagi masyarakat dalam penerapan E-Government yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penempatan Luar Negeri dan Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia melalui wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Eli Nurhaya yang menjelaskan: "Ketersediaan informasi dan berita bagi masyarakat di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah cukup baik, karena kami menyebarluaskan informasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, situs web dinas, dan papan pengumuman. Selain itu, kami juga mengadakan sosialisasi untuk memberitahukan informasi dan berita yang relevan dengan masyarakat. "

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa ketersediaan informasi dan berita untuk masyarakat terkait penerapan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah memadai. Namun, saat wawancara dengan Nia, seorang pemohon Kartu Tanda Pencari Kerja Online berusia 22 tahun, ia menyampaikan: "Saya tidak tahu banyak tentang proses pembuatan kartu tanda pencari kerja, karena informasi yang saya peroleh hanya dari teman. Saya juga belum mengetahui informasi mengenai kartu pencari kerja online, yang

saya tahu hanya tentang yang manual. " Berdasarkan dimensi dan parameter yang telah dijelaskan di atas, kesimpulannya adalah pengembangan aplikasi harus ditingkatkan, terutama dalam penerapannya di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menciptakan sistem aplikasi sendiri yang bermanfaat untuk masyarakat serta untuk Dinas Ketenagakerjaan, terutama dalam pelayanan Kartu Pencari Kerja Online. Selain itu, website yang ada juga harus dikembangkan agar tidak terjadi kesalahan saat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja Online, dan ketersediaan informasi serta berita bagi masyarakat harus dioptimalkan. Penyebaran informasi tidak hanya melalui media sosial, papan pengumuman, dan website dinas, tetapi juga perlu ada inovasi baru melalui media cetak seperti koran, televisi lokal, serta banner.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan dan pengembangan kompetensi adalah strategi yang memberikan peluang kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan, guna menciptakan pegawai yang mampu dan terampil. Pelatihan ini menjadi modal yang berharga untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka. Dalam konteks ini, dengan mempertimbangkan keberadaan aparatur dan penerapan e-government, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang tugas mereka melalui:

Bimtek. Dalam zaman digital ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan Bimtek (bimbingan teknis/pelatihan) yang bertujuan untuk memberikan peserta pelatihan yang berguna dalam memperkuat keterampilan mereka. Materi yang diajarkan difokuskan pada pembentukan

tim kerja yang efektif. Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, E-government mendorong pelaksanaan pelatihan teknis agar pegawai dapat menjadi lebih kompeten. Berikut adalah wawancara mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi dari Kepala Seksi Penempatan Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Ibu Ila Hindansyah, ST: “Di Dinas Ketenagakerjaan, kami secara konsisten melaksanakan Bimtek (bimbingan/pelatihan) khususnya untuk operator yang bertanggung jawab dalam pembuatan kartu pencari kerja online dan juga untuk operator yang membuat rekomendasi Pasfor CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) demi pengembangan kompetensi di bidang tersebut.”

Bursa Kerja. Dinas Ketenagakerjaan pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk membantu pencari kerja, khususnya mereka yang tidak diterima di perusahaan karena kriteria yang kurang sesuai. Bursa kerja berfungsi sebagai wadah bagi pencari kerja dan perekrut untuk bertatap muka dalam waktu yang singkat. Dinas Ketenagakerjaan juga berperan dalam membantu pencari kerja yang kesulitan untuk diterima melalui website, dengan bimbingan dari Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berikut adalah wawancara tentang pelatihan dan pengembangan kompetensi dari Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bapak Wahyu Sudianto, S. IP: “Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi di pasar kerja. Jika terdapat kualifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan dapat memberikan bantuan agar individu tersebut memiliki pekerjaan dan keterampilan yang cukup untuk menjadi wirausaha.” Berdasarkan penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan

kompetensi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah dilakukan dengan cukup baik. Dinas ini secara rutin melakukan peningkatan dalam hal kompetensi pasar kerja, serta menghadirkan inovasi baru untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan mendirikan balai diklat khusus yang ditujukan untuk pelatihan dan pengembangan pasar kerja, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki keahlian dan mampu menjadi wirausaha. Selain itu, pelatihan Bimtek juga diadakan untuk mendukung implementasi E-Government.

Keadaan Sumber Daya Manusia yang Mendukung ahli di bidangnya. Sumber Daya Manusia sangat penting untuk keberhasilan E-Government. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan E-Government karena didukung oleh pekerja yang ahli di bidangnya. Berikut adalah pendapat mengenai keadaan Sumber Daya Manusia yang mendukung keahlian berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Ibu Ila Hindansyah, ST: “Keberadaan tenaga kerja yang ahli di bidangnya sudah cukup memadai, misalnya pada bagian Operator AK/1, namun masih diperlukan perbaikan agar pegawai di bagian ini dapat mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan mereka.” Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keadaan sumber daya manusia sudah relatif baik, tetapi pelatihan dan pengembangan bagi staf pegawai tetap harus dilakukan. Diperlukan kualitas yang memadai dari Sumber Daya Manusia di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar dapat bersaing dan kompetitif, sehingga menghasilkan pegawai yang benar-benar ahli di bidangnya.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memfasilitasi E-Government

Kesuksesan E-Government bukan hanya bergantung pada perangkat lunak, melainkan juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memungkinkan pelaksanaan E-Government berjalan lebih lancar. Berikut adalah pandangan mengenai Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Memfasilitasi E-Government menurut Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bapak Wahyu Sudianto, S. IP, yaitu: "Pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung aktivitas dinas, terutama dalam layanan pembuatan kartu tanda pencari kerja secara online, CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) telah cukup mendukung." Penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Memfasilitasi E-Government telah berjalan dengan baik, terlihat dari kondisi Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memiliki 58 pegawai, terdiri dari staf, operator AK/1, dan petugas kebersihan. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia sudah cukup mendukung penerapan E-Government baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Fasilitas dan Infrastruktur yang Mendorong Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Penerapan E-Government

Untuk mendukung E-Government, selain harus ada Sumber Daya Manusia yang memadai, fasilitas dan infrastruktur juga berperan penting dalam pelaksanaannya. Jika fasilitas dan infrastruktur mampu membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka, maka penerapan E-Government di pemerintahan akan berjalan dengan baik, karena karyawan akan merasa puas dengan dukungan yang ada. Berikut adalah pendapat mengenai Fasilitas dan Infrastruktur yang Mendorong Kualitas

Sumber Daya Manusia dalam Penerapan E-Government dari Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bapak Wahyu Sudianto, S. IP: "Fasilitas dan infrastruktur di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah memadai. Untuk mendukung pelayanan Kartu Pencari Kerja, kami telah menyediakan komputer khusus untuk operator AK/1 dalam proses pembuatan kartu pencari kerja secara online." Berdasarkan dimensi dan parameter yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah cukup optimal. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang ahli di bidangnya sudah memadai, karena dinas tersebut secara rutin mengadakan pelatihan untuk pegawainya, baik operator maupun staf. Mengenai Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Memfasilitasi E-Government juga sudah berjalan baik, terlihat dari jumlah pegawai yang memenuhi sebanyak 58 orang yang terdiri dari pegawai dinas, operator AK/1, dan petugas kebersihan. Fasilitas dan Infrastruktur yang Mendorong Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Penerapan E-Government juga telah mendukung, karena tersedia fasilitas yang diperlukan oleh pegawai.

Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi berfungsi sebagai dasar atau struktur yang menyokong sistem dalam pemerintahan, terutama dalam penerapan E-government, di mana diperlukan adanya infrastruktur komunikasi dan teknologi yang mendukung untuk menciptakan layanan yang efektif dan efisien. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi mencakup semua aspek yang berhubungan dengan penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Oleh karena itu, kedua bidang ini dapat membantu

pemerintah dalam melaksanakan E-government. Berikut adalah wawancara mengenai Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Teknologi Informasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bapak Wahyu Sudianto, S. IP: “Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah sangat memadai karena telah memiliki infrastruktur teknologi yang baik dalam menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.” Dari penelitian yang telah penulis lakukan, disimpulkan bahwa ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Teknologi Informasi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan E-Government.

Adanya Ketersediaan Perangkat Komputer yang Memadai

Tersedianya perangkat komputer yang cukup dan memadai akan sangat membantu dalam implementasi E-Government, karena salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilannya adalah keberadaan perangkat komputer yang mendukung. Berikut adalah wawancara mengenai Ketersediaan Perangkat Komputer yang Memadai, yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bapak Wahyu Sudianto, S. IP: “Ketersediaan perangkat komputer dan fasilitas lainnya yang mendukung pelayanan kartu pencari kerja sudah memadai.” Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Ketersediaan Perangkat Komputer yang memadai sudah mendukung, karena Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki beberapa perangkat komputer yang mendukung tugas yang berbasis E-Government, seperti komputer untuk pembuatan Kartu Pencari Kerja secara online.

Jaringan Komputer yang Mendukung Untuk mendukung penerapan E-Government, komputer sangat penting, tetapi jaringan komputer juga berperan dalam proses tersebut, karena dengan adanya jaringan yang baik, pelayanan online tidak akan terhambat oleh masalah jaringan yang buruk. Berikut adalah wawancara mengenai Jaringan Komputer yang Mendukung, yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bapak Wahyu Sudianto, S. IP: “Jaringan komputer di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah cukup mendukung pelayanan online, kami menyediakan wifi khusus untuk dinas.” Sementara itu, wawancara dari Bagian Operator AK/1 mengungkapkan: “Jaringan komputer sudah memadai karena ada wifi, namun terkadang ada masalah seperti hilangnya sinyal yang menghambat pelayanan Kartu Pencari Kerja.” Berdasarkan segala informasi dan parameter yang telah penulis sampaikan di atas, kesimpulannya adalah bahwa Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Teknologi Informasi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum sepenuhnya memadai untuk mendukung penerapan E-Government, dikarenakan adanya masalah jaringan yang sering terjadi dan dapat mengganggu pelayanan online.

Keberadaan Kerangka dan Perangkat Hukum

Keberadaan perangkat hukum di dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting untuk melindungi serta mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya. Hukum pada dasarnya adalah regulasi yang mengatur tindakan (perilaku) individu dan masyarakat, di mana pelanggar akan mendapatkan hukuman dari negara. Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, hal ini diatur dalam peraturan menteri mengenai

penempatan tenaga kerja pasal 39 tahun 2016. Berikut adalah wawancara mengenai adanya kerangka dan perangkat hukum, yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bapak Wahyu Sudianto, S. IP, yang menyatakan: “Keberadaan kerangka dan perangkat hukum di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah diatur dalam Peraturan Menteri tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 39 tahun 2016, guna mendukung pelaksanaan pelayanan baik secara online maupun manual. ” Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bisa disimpulkan bahwa kerangka dan perangkat hukum di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah tersedia dan diatur dalam Peraturan Menteri tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 39 tahun 2016. Ini berfungsi untuk melindungi sistem kerja di Dinas Ketenagakerjaan, baik untuk layanan yang dilakukan secara online maupun manual.

Adanya Perlindungan Hukum agar Terhindar dari Pelanggaran cyber

Perlunya Perlindungan Hukum dalam E-Government. Untuk mendukung penerapan E-Government, sangat diperlukan adanya perlindungan hukum guna menghindari pelanggaran di dunia maya yang bisa mengganggu pelayanan pemerintah. Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sudah terdapat peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 39 tahun 2016. Untuk melindungi diri dari pelanggaran cyber, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur informasi dan transaksi Elektronik (ITE), bertujuan untuk melindungi sektor pemerintahan dari kejahatan cyber. Berikut adalah wawancara terkait Perlindungan Hukum dari Pelanggaran cyber, yang disampaikan oleh

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bapak Wahyu Sudianto, S. IP: “Keberadaan dan perangkat hukum di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah diatur dalam Peraturan Menteri tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 39 tahun 2016. Sementara itu, untuk perlindungan hukum dari pelanggaran cyber, kami merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi Elektronik (ITE) demi pelayanan berbasis online. ” Berdasarkan dimensi dan parameter yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kerangka dan Perangkat Hukum di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah ada sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 39 tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran cyber merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE), yang bertujuan untuk melindungi lingkungan pemerintahan dari kejahatan cybercrime.

Pengembangan Berbagai Kanal Akses

Dalam rangka mendukung e-government, diperlukan pengembangan berbagai saluran akses untuk pemerintah agar pelayanan dapat berjalan dengan efektif. Saluran akses adalah elemen penting dalam pengembangan e-government karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat saluran akses yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, sebagai berikut:

1. Media Sosial. Sebagai upaya mendukung pelayanan e-government, Dinas Ketenagakerjaan memanfaatkan media sosial sebagai saluran akses untuk menyampaikan informasi kepada

masyarakat. Media sosial berfungsi sebagai platform untuk berinteraksi secara online, memungkinkan orang untuk saling berkomunikasi tanpa terhalang waktu dan tempat. Berikut adalah wawancara mengenai Pengembangan Berbagai Kanal Akses yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penempatan Luar Negeri dan Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia, Dra. Hj. Eli Nurhaya: “Pengembangan saluran akses di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertujuan untuk pembuatan kartu tanda pencari kerja maupun pembuatan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dan informasi lainnya yang disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial seperti E-Mail Dinas, Instagram, Facebook, serta melalui Pengumuman di ruangan dinas.”

2. Sosialisasi Masyarakat. Agar pelaksanaan E-Government dapat berjalan dengan baik, tidak hanya dibutuhkan media sosial, tetapi juga pengembangan Kanal Akses untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, dilakukan sosialisasi supaya masyarakat lebih mudah memahami informasi yang ada di lingkungan dinas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan mengenai internet atau media sosial. Berikut adalah wawancara mengenai Pengembangan Berbagai Kanal Akses yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bapak Wahyu Sudianto, S. IP: “Alasan kami menggunakan sosialisasi masyarakat dalam pengembangan Kanal Akses adalah agar mereka yang mencari pekerjaan atau berkaitan dengan tenaga kerja dapat dibantu oleh Dinas Ketenagakerjaan melalui pelatihan dan pengembangan agar

memiliki keahlian yang diperlukan di pasar kerja.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Kanal Akses di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah cukup baik dan mendukung pelaksanaan E-Government. Kunci keberhasilan E-Government terletak pada pelaksanaan kanal akses yang berlangsung secara efektif dan efisien, tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya. Namun, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu terus mengembangkan berbagai kanal akses, tidak hanya melalui media sosial dan sosialisasi masyarakat. Harus ada cara baru agar masyarakat dapat lebih memahami informasi yang disampaikan, karena sering kali informasi di media sosial diabaikan jika tidak menarik, bahkan sosialisasi kepada masyarakat juga perlu inovasi agar lebih mudah dipahami.

Adanya Multi Access Channel Sehingga Memudahkan Masyarakat untuk Melihat Secara Langsung Kegiatan Pemerintah

Kehadiran Multi Access Channel adalah wujud kerjasama yang konkrit antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya berbagai Multi Access Channel, masyarakat bisa langsung melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jenisnya bisa berupa kolom opini, tautan akses, video, dan lain-lain yang biasanya tersedia di situs-situs resmi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat menyampaikan opini, saran, dan pendapat mereka.

Berikut adalah pendapat mengenai adanya Multi Access Channel yang memudahkan masyarakat untuk melihat langsung kegiatan pemerintah yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Penempatan Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi melalui wawancara dengan Ibu Ila Hindansyah, ST: “Di Dinas

Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Multi Access Channel belum berjalan dengan baik, karena kami hanya menyediakan kolom opini di website, untuk tambahan Multi Access Channel lainnya mungkin akan dibuat tahun depan, insya Allah. ” Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adanya Multi Access Channel belum berjalan baik karena kurang didukung dengan tautan website yang menyajikan materi langsung, seperti video mengenai rapat pemerintah. Informasi tentang profil dinas juga masih tidak lengkap, dan aplikasi untuk mendukung aspirasi masyarakat belum tersedia, karena Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya menyediakan kolom Laporan saja.

Adanya Penyediaan Link untuk Mempermudah Masyarakat Menyampaikan Opini, Saran ataupun Pendapat

Link adalah sebuah koneksi atau sambungan dari satu sumber ke sumber lain yang bertujuan untuk mengarahkan pengunjung ke halaman atau situs web yang berbeda. Tersedianya link bagi pemerintah yang telah menerapkan E-Government mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang berlangsung di pemerintah, seperti berita atau informasi yang relevan dengan masyarakat. Berikut ini adalah tentang Tersedianya Link untuk Mempermudah Masyarakat dalam Menyampaikan Opini, Saran, atau Pendapat yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penempatan Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi dalam wawancara dengan Ibu Ila Hindansyah, ST: “Untuk website kami telah menggunakannya guna menyampaikan berbagai layanan seperti: Kartu Tanda Pencari Kerja Online, CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), dan layanan lainnya. ” Penelitian menunjukkan bahwa Tersedianya Link untuk

Mempermudah Masyarakat dalam Menyampaikan Opini, Saran, atau Pendapat sudah berjalan dengan baik, karena Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah memiliki link website dinas sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan berita. Selain itu, terdapat juga kolom laporan di website dinas, tetapi kolom ini perlu dikembangkan lebih jauh menjadi aplikasi yang dapat merangkum aspirasi masyarakat, seperti aplikasi Laporan. Sebab, dari yang saya amati, kolom laporan di website tersebut belum menampung aspirasi masyarakat. Berdasarkan dimensi dan parameter yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulannya adalah Pengembangan Berbagai Kanal Akses belum sepenuhnya optimal karena kurangnya Multi Access Channel untuk mendukung penerapan E-Government. Jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang relevan tentang kegiatan pemerintah, maka informasi dan berita tidak akan tersampaikan dengan baik. Meskipun ada kolom laporan untuk merangkum aspirasi masyarakat, tetap saja masyarakat tidak akan tahu tentang kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, kolom laporan perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi yang dapat merangkum aspirasi masyarakat, seperti aplikasi Laporan. Tersedianya Link sudah cukup mendukung, dan juga beragam kanal akses seperti melalui media sosial serta sosialisasi kepada masyarakat telah dilaksanakan, namun tetap diperlukan perbaikan untuk mengembangkan kanal akses yang masih kurang mendukung agar penerapan E-Government dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

Pola Permodalan Proyek E-Government

Agar pelaksanaan e-government bisa memberikan layanan yang maksimal, perlu adanya permodalan proyek untuk melaksanakan e-government dengan baik. Pola permodalan proyek dalam e-

government bertujuan untuk menangani jika terjadi kerusakan pada infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi; dengan adanya modal proyek untuk e-government, hal ini akan mendukung dan tidak menghambat proses pelayanan dalam penggunaan e-government. Dalam wawancara tentang Pola Permodalan Proyek E-Government, Ibu Ila Hindansyah, ST selaku Kepala Seksi Penempatan Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi menyatakan: “Saat ini, permodalan proyek e-government di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum memiliki anggaran untuk tahun ini karena terhalang oleh kepentingan lain. Insya Allah, pada tahun 2022 akan dianggarkan untuk mendukung proses pelaksanaan e-government.”

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan untuk proyek e-government di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum terlaksana pada tahun ini dan dapat diusulkan untuk anggaran tahun 2022. Oleh karena itu, implementasi e-government belum berlangsung dengan optimal karena dari aspek pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung keberadaan e-government ini belum dialokasikan.

Adanya Ketersediaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program-Program

Keberhasilan E-Government tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat komputer yang memadai, tetapi juga oleh anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan E-Government itu sendiri. Anggaran berperan sebagai kunci dalam kelancaran seluruh proses E-Government. Untuk itu, pelaksanaan E-Government memerlukan alokasi anggaran yang signifikan. Oleh karena itu, perhatian terhadap ketersediaan dana untuk program-program yang terkait dengan pelayanan berbasis e-government sangatlah penting.

Berikut adalah wawancara mengenai ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program-program yang disampaikan oleh Ibu Ila Hindansyah, ST, selaku Kepala Seksi Penempatan Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi: “Anggaran khusus untuk program-program yang tidak berbasis online sudah tersedia, seperti yang terkait dengan koperasi. Namun, untuk keperluan online, seperti pengembangan sistem aplikasi yang baik dan perbaikan website, belum ada anggaran.”

Dari dimensi dan parameter yang telah penulis bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pola pendanaan proyek E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum mendukung pelaksanaan E-Government secara efektif. Ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk permodalan proyek E-Government, termasuk pengembangan sistem aplikasi baru, perbaikan website dinas, serta peningkatan akses multi channel website, belum terlaksana. Dengan demikian, implementasi E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum mencapai hasil yang optimal.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi E-Government Kartu Tanda Pencari Kerja Online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

Komponen Penerapan E-Government yang Belum Terealisasi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

Sebelumnya, penulis telah mengidentifikasi enam komponen penerapan E-Government yang menjadi acuan dalam keberhasilan implementasi E-Government. Keenam komponen ini saling terkait, sehingga jika salah satu komponen tidak terealisasi, akan berdampak pada komponen lainnya. Berikut adalah komponen penerapan E-Government yang

belum terwujud di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka:

Pengembangan Aplikasi. Penulis mencatat bahwa komponen pengembangan aplikasi belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat saat wawancara dengan Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, di mana penulis merasa kurang puas dengan jawaban yang diberikan. Terdapat kekurangan dalam penggalan informasi terkait E-Government, dan saat ini, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih bergantung pada akses dari Kementerian Ketenagakerjaan. Akibatnya, akses untuk pembuatan kartu tanda pencari kerja secara online dari Kementerian Ketenagakerjaan ditutup sementara, sehingga Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengalami kesulitan dalam menangani lonjakan pemohon yang ingin membuat kartu pencari kerja.

Pengembangan Kanal Akses.

Kanal Akses adalah elemen penting untuk keberhasilan pelaksanaan e-government yang perlu terus ditingkatkan demi mendukung sistem ini dalam pemerintahan. Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah dilakukan pengembangan kanal akses melalui media sosial dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang kurang paham informasi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Nia, seorang pemohon kartu tanda pencari kerja berusia 22 tahun: "Saya belum tahu informasi tentang pembuatan kartu pencari kerja karena hanya menyadarinya dari teman. Saya juga tidak mengetahui adanya sistem pembuatan kartu pencari kerja secara online, yang saya ketahui hanya hal-hal manual."

1. Dari wawancara itu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kanal akses

masih kurang optimal, karena masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan informasi meskipun sudah diinformasikan via media sosial dan sosialisasi. Oleh karena itu, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu melakukan inovasi agar informasi yang disediakan dapat menjangkau lebih banyak orang.

2. Pola Permodalan Proyek E-Government. Selain kanal akses, pola permodalan proyek e-government juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-government. Penulis berpendapat bahwa pola permodalan proyek ini belum terlaksana secara efektif. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi, penulis merasa kurang puas dengan jawaban yang diberikan. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman mengenai e-government, bahkan saat menjelaskan permodalan, kepala seksi hanya menyampaikan bahwa anggaran baru akan diterapkan di tahun 2022 tanpa rincian yang jelas.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi E-Government Melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. Menyikapi faktor-faktor penghambat yang telah dibahas, dinas tidak tinggal diam dan membiarkan masalah ini terus ada. Untuk memastikan keakuratan data, penulis menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan metode verifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada waktu yang berbeda. Terdapat tiga jenis triangulasi: triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penulis mengadopsi teknik triangulasi ini karena dapat mengurangi perbedaan

konstruksi kenyataan yang muncul saat mengumpulkan data dari berbagai kejadian dan perspektif (Sugiyono, 2017: 273). Salah satu cara untuk mengakses sumber data adalah dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan informan, sehingga penulis mendapatkan informasi yang akurat mengenai masalah yang sedang diteliti. Upaya-upaya yang dilakukan dinas untuk mengatasi hambatan ini adalah sebagai berikut:

4. Peningkatan Sosialisasi. Dinas melakukan sosialisasi dengan memberikan arahan secara langsung mengenai pelayanan yang akan diberikan. Selain itu, informasi juga disampaikan melalui papan pengumuman, serta dengan cara visual seperti memasang iklan di koran, televisi lokal, dan radio, baik di media sosial untuk terus mengenalkan E-Government melalui kartu tanda pencari kerja online.
5. Mengajukan pelatihan untuk pegawai IT yang ahli. Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu terus meningkatkan berbagai aplikasi serta memberikan dukungan kepada pegawai guna membangun E-Government. Hal ini penting untuk menunjang kegiatan melalui kartu pencari kerja secara online. Oleh karena itu, dinas harus mengadakan pelatihan khusus agar operator, staf, atau pegawai memiliki keterampilan dalam mengelola sistem informasi tersebut, sehingga
6. E-Government dapat berjalan dengan baik dan kualitas pembuatan kartu pencari kerja online bisa terus ditingkatkan.
7. Sarana dan Prasarana. Dalam upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana, pihak dinas telah memanfaatkan beberapa ruang yang ada untuk tujuan yang lebih produktif.

Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu ruangan sekat di dinas tersebut digunakan sebagai dapur, dan lahan yang cukup luas di tengah kantor telah dijadikan taman untuk memperindah suasana serta memberikan kesan positif bagi pegawai dan masyarakat yang menerima pelayanan. Namun, dinas tidak dapat melakukan perubahan pada bangunan karena kantor tersebut merupakan warisan yang asli dan tidak boleh diubah.

8. Pengembangan Aplikasi. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pengembangan aplikasi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum optimal, terutama dalam pelayanan kartu pencari kerja online yang masih bergantung pada situs web Kementerian Ketenagakerjaan RI. Oleh karena itu, Dinas Ketenagakerjaan perlu berupaya mengembangkan aplikasinya sendiri agar pelayanan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, tanpa harus khawatir akan kendala yang mungkin muncul dari situs web Kementerian Ketenagakerjaan RI jika terjadi kesalahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan penulis mengenai penerapan E-Government menggunakan Kartu Tanda Pencari Kerja Online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka, penulis menyimpulkan dari hasil skripsi sebagai berikut:

1. Penerapan E-Government melalui kartu pencari kerja online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka masih berada pada tahap permulaan atau persiapan, yaitu:
 - a. Pembuatan siklus informasi di setiap instansi;

- b. Penyiapan sumber daya manusia (SDM);
- c. Penyiapan akses yang mudah, seperti menyediakan fasilitas Multipurpose, Community Center, SME-Center, dan lain-lain.

Dari ketiga langkah tersebut, diperlukan penyediaan akses yang mudah, karena setiap individu memerlukan sarana untuk memperoleh informasi dan berita dengan lebih baik. Mengingat kartu pencari kerja online ini baru mulai dioperasikan pada awal tahun 2019, maka persiapannya harus dilakukan dengan perencanaan yang sangat baik.

2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan E-Government melalui kartu tanda pencari kerja online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka masih belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu:

- a. Pengembangan aplikasi. Permasalahan pengembangan aplikasi perlu ditingkatkan, terutama dalam pemakaian aplikasi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar berupaya untuk menciptakan sistem aplikasi sendiri yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk Dinas Ketenagakerjaan itu sendiri. Khususnya terkait pelayanan Kartu Pencari Kerja Online dan website yang sudah ada dari Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah harus dapat diperbaiki lagi untuk mencegah terjadinya kesalahan saat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja Online. Selain itu, untuk memastikan ketersediaan informasi dan berita bagi masyarakat lebih dioptimalkan sehingga informasi dapat tersebar luas, tidak hanya melalui media sosial, papan pengumuman, dan website tetapi juga dengan melakukan inovasi baru melalui media cetak koran, televisi lokal, dan spanduk.

- b. Pengembangan saluran akses. Pengembangan saluran akses yang berbeda masih kurang optimal karena minimnya Multi Access Channel yang mendukung penerapan E-Government. Jika masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai kegiatan pemerintah, maka informasi dan berita tidak akan tersampaikan dengan baik. Meskipun ada kolom laporan untuk menampung aspirasi masyarakat, tetap saja masyarakat tidak akan tahu mengenai kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, kolom laporan perlu dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang bisa dipakai untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, seperti aplikasi Lapor misalnya. Selama penelusuran pada website terkait, tidak terlihat ada aspirasi masyarakat yang terdaftar.
- c. Penyediaan tautan dianggap cukup mendukung, dan beragam saluran akses melalui media sosial serta sosialisasi kepada masyarakat sudah dilaksanakan. Namun, tetap diperlukan perbaikan untuk mengembangkan saluran akses agar mendukung penerapan E-Government agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.
- d. Pola pembiayaan proyek E-Government. Model pembiayaan untuk proyek E-Government yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum menunjang pelaksanaan E-Government tersebut, karena ketersediaannya belum optimal.

3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan E-Government melalui kartu tanda pencari kerja online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka, yaitu:

- a. Peningkatan Sosialisasi. Dinas melakukan sosialisasi dengan cara memberikan beberapa penjelasan secara langsung mengenai pelayanan yang akan diberikan. Selain itu, mereka

juga menyampaikan informasi melalui papan pengumuman dan media visual seperti iklan di surat kabar, televisi lokal, dan radio, termasuk media sosial, untuk lebih memperkenalkan E-Government lewat kartu pencari kerja daring.

- b. Mengajukan Diklat untuk pegawai ahli IT. Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu terus melakukan pengembangan dalam penerapan, baik dari sisi aplikasi maupun dukungan dari pegawainya, untuk membangun E-Government yang mendukung sistem kartu pencari kerja daring. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus agar operator, staf, atau pegawai memiliki keahlian tersendiri dalam pengelolaan sistem informasi ini, sehingga E-Government dapat berfungsi dengan baik dan kualitas pembuatan kartu pencari kerja daring dapat terus meningkat.
- c. Sarana Prasarana. Untuk menambah fasilitas, pihak dinas telah memanfaatkan beberapa ruangan agar lebih berguna. Seperti yang penulis perhatikan di beberapa ruangan di kantor, salah satunya adalah ruang sekat yang dimanfaatkan sebagai area dapur, dan lahan yang cukup luas di tengah kantor dinas diubah menjadi taman, demi mempercantik lingkungan serta memberikan kesan positif untuk para pegawai dan masyarakat yang mengunjungi kantor. Namun, dinas tidak dapat mengubah bangunan karena kantor tersebut adalah asli atau warisan yang tidak bisa diubah.
- d. Pengembangan Aplikasi. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pengembangan aplikasi di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum optimal, mengingat pelayanan kartu pencari kerja daring masih bergantung pada

website Kementerian Ketenagakerjaan RI. Oleh sebab itu, Dinas Ketenagakerjaan perlu berupaya melakukan pengembangan aplikasi secara mandiri agar pelayanan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien tanpa harus khawatir mengenai kendala dari website Kementerian Ketenagakerjaan RI apabila terjadi kesalahan.

Dengan Sebagai berikut :

1. Sarana akses yang baik untuk siklus informasi yang disampaikan juga dapat diperbarui setidaknya seminggu sekali, sehingga akses terhadap layanan menjadi lebih mudah.
2. Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka telah sangat memperhatikan layanan dengan menyediakan kartu pencari kerja secara online untuk masyarakat, namun dalam praktiknya terdapat kekurangan yaitu pengembangan aplikasi dan berbagai saluran akses. Oleh karena itu, dinas tersebut telah memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Majalengka untuk memperhatikan waktu yang singkat agar dapat mendukung keberadaan E-Government melalui kartu pencari kerja secara online.
3. Terdapat kendala pada beberapa elemen penerapan E-Government yang masih belum dimaksimalkan, seperti pengembangan aplikasi, pengembangan beragam saluran akses, dan pola pendanaan untuk proyek E-Government.
4. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak dinas telah menghasilkan beberapa kemajuan, antara lain dengan meningkatkan sosialisasi melalui pelaksanaan bimtek (pelatihan atau bimbingan) bagi masyarakat yang ingin memiliki keterampilan dan kompetensi dalam dunia kerja, serta menyebarkan

informasi melalui media sosial dan banner.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memperbaiki kendala beberapa faktor yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam penerapan E-Government ini, diantaranya dari enam komponen yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan aplikasi, pengembangan beragam saluran akses, dan pola pendanaan proyek E-Government.
2. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar masyarakat memahami kemudahan layanan melalui kartu pencari kerja online. Mengingat pada era modern ini, menyampaikan informasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Sofyan. 2004. *Paradigma Pembangunan Kelembagaan Publik dan Reinventing Government*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Indrajit Richardus Eko, 2002. *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Indrajit Richardus Eko, 2005. *Electronic Government in Action Strategi Implementasi di Berbagai Negara*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Richardus Eko. 2006. *Evolusi Strategi Integrasi Sistem Informasi Ragam Institusi*. Jakarta.
- Juwono dan Amy Y.S., 2018. *Birokrasi & Governance (Teori, Konsep, dan Aplikasinya)*.

Ridwan, Juniarso. Sodik Sudrajat, Achmad.2011. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Ujungberung, Bandung-Indonesia.

Prof. Dr. Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syokrani, MS dan Dr. Syahriani, Msi. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.

Wardiyanto dan Falih Suaedi. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-governance*. Graha Ilmu Ruko Jambusari No.7A Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government.
- Peraturan bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten majalengka
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja.

Jurnal

- Jurnal Analisis Penerapan E-Government Di Kabupaten Sragen. Vol.13 N0.1 September 2013:50 – 66
- Jurnal Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru

dalam Pelayanan Publik. Vol.2 No.1,
April 2013: 174-201, ISSN: 2252-
4266.